

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menimbulkan dampak negatif diantaranya polusi udara hasil dari pembakaran hutan dan lahan. Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami permasalahan polusi udara dari kebakaran hutan dan lahan adalah Provinsi Jambi. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materil maupun immateril.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi hampir setiap tahun terjadi, wilayah kebakaran biasanya terjadi pada musim kemarau, lahan yang paling luas terbakar adalah lahan gambut, mayoritas terjadi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang memproduksi di atas lahan gambut.

Motif kebakaran lahan yang disebabkan aktivitas manusia tersebut atas pertimbangan aspek ekonomi, budaya dan sosial. Aspek ekonomi yakni alasan yang dikemukakan bahwa pembukaan lahan dengan membakar maupun merupakan cara yang paling mudah, murah serta lebih efektif. Aspek budaya, dulu kebiasaan masyarakat Jambi juga membuka lahan dengan cara membakar, akan tetapi api tidak sampai merambat, karena lahan gambut masih relatif basah dan tentunya pada saat pembakaran juga dijaga dan pola yang dipakai masyarakat setempat tergolong rendah, karena mereka menganggap bahwa jika terjadi kebakaran dan merambat ke lahan mereka maka lahan akan menjadi luas tidak perlu mereka membuka lahan sendiri.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki hutan dan lahan gambut yang luas. Luas lahan yang dimiliki Provinsi Jambi mencapai 736.227,200 hektar. Pada istansi pemerintah bencana akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi 99 persen disebabkan oleh ulah manusia. Faktor yang di sebabkan oleh manusia ini terjadi karena disengaja atau tidak disengaja. Hal ini merupakan faktor utama terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan sekaligus yang melakukan upaya pencegahan dan pengendalian.¹

Gambar 1.1
Peta Sebaran Titik Api di Provinsi Jambi



Sumber: Data dokumentasi BPBD Provinsi Jambi

Dari data yang dihimpun dari Satgas kebakaran hutan dan lahan kebakaran terjadi pada tahun 2015-2019 telah menghanguskan lahan terbakar 1.740.796 Ha. Peningkatan ini terus berkelanjutan hingga tahun 2019 saat ini dapat dikatakan bahwa dalam dua abad terakhir ini Indonesia telah mengalami ribuan bencana sebagian besar wilayah Provinsi Jambi berpotensi rawan dan sering mengalami kejadian bencana, baik alam, non alam maupun bencana sosial, kejadian bencana dapat menimbulkan keadaan darurat yang ditandai dengan terancamnya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jambi pada umumnya mengalami dua musim yaitu musim

¹ Data dokumentasi BPBD Provinsi Jambi

kemarau dan musim hujan, ketika musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi sangat rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, selanjutnya ketika telah memasuki musim hujan maka Provinsi Jambi dalam rawan banjir.²

Tabel 1.1
Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi (Ha) Tahun 2015 – 2019

Tahun	Hotspot	Luas Lahan Terbakar
2015	1.654	19.528
2016	64	257.39
2017	83	579
2018	120	970.16
2019	1.190.419	1.720.689
Jumlah	1.192.340	1.740.796
Rata – Rata	238.468	348.159,2

Sumber : Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

Dalam beberapa tahun ini hampir sebagian wilayah di Provinsi Jambi mengalami bencana. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian pada aspek perekonomian dan aspek psikologi korban bencana tersebut, serta tentunya memerlukan suatu upaya penanggulangan bencana. Pemerintah pusat telah membuat suatu kebijakan publik dalam upaya penanganan penanggulangan bencana yaitu dengan membentuk salah satu badan nasional yang membidangi penanggulangan bencana yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).³

Lembaga ini dibuat oleh Pemerintah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah untuk mengatasi bencana yang ada di Indonesia Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun tentang pembentukan BNPB dan merupakan realisasi Pasal

² Data dokumentasi BPBD Provinsi Jambi

³ Suartini Ketut, *Evaluasi Penanggulangan Bencana Daerah Bandung dalam Bidang Kesiapsiagaan terhadap Bencana*, (Universitas Udayana, 2017).

10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 Ayat (2) dari Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa lembaga ini merupakan Lembaga Pemerintahan non Departement setingkat Menteri.⁴

Meski upaya Pemerintah telah membentuk Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) dan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan(Satlakdalkarhutla) maupun tim koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan sekarang menjadi Badan Nasional Pengendalian (BNPB) Badan Penanggulangan Daerah (BPBD). Namun sulit sekali dilaksanakan. Sekalipun disadari kebakaran hutan selalu berulang, namun tingkat kewaspadaan aparat khususnya di daerah, terkesan sangat kurang. Pemerintah baru bergegas melakukan tindakan bahkan terlihat panik bila kebakaran sudah mulai terjadi, kemudian menurun apabila kebakaran sudah dapat di atasi. Semestinya, kewaspadaan tetap tinggi setidaknya mengikuti indikator titik api dari hasil pemantauan satelit.

Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan diterapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penaggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana.

Bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan kendala yang dihadapi oleh badan penaggulangan bencana daerah dimana lokasi

⁴ Peraturan Presiden No 8 Pasal 10 ayat 1 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

kebakaran sulit dijangkau, sumber air untuk pemadaman jauh dari lokasi kebakaran masih kurangnya kesadaran tentang bahaya kebakaran dan dampak yang akan dihadapi masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dimana peran badan penanggulangan bencana masih memiliki kendala dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di karena banyak hal yang masih belum terlaksana hal yang membuat kurang tanggapnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dilapangan, dimana kebakaran hutan yang semakin meningkat dari dua tahun terakhir ini di Provinsi Jambi yang mengakibatkan kerugian bagi Negara dan masyarakat sekitar yang terkena dampak terhadap kebakaran hutan dan lahan tersebut.

“Ombudsman RI Perwakilan Jambi melakukan pemantauan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kesiapan tersebut dalam rangka menghadapi musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi memantau kesiapan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Pemerintah perlu mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dari tahun ke tahun. Kami melihat kesiapan pemerintah,” jelas Jafar Ahmad, Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi. Jafar menegaskan bahwa kesiapan pemerintah terlihat dari upaya pencegahan dan sosialisasi hingga pembentuk tim siaga”.⁵

Dalam mencapai tujuan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari penguatan kelembagaan. Pendekatan efisiensi utama yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi adalah pendekatan kemampuan. Oleh karena itu penguatan kelembagaan sangat penting terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan

⁵ <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-cek-kesiapan-cegah-karhutla-> diakses pada tanggal 21 Juli 2021.

lahan yang telah dilakukan oleh pemerintah⁶. Berdasarkan hal tersebut yang menarik dijadikan penelitian adalah apakah peristiwa kebakaran yang menjadi bencana rutin setiap tahun tersebut karena lemahnya penguatan kelembagaan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu tujuan penelitian ini bagaimana penguatan kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dila Ramadanti berjudul peran pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.⁷ Bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan terutama di Provinsi Riau. Dampak yang paling menonjol dari kebakaran hutan adalah kabut asap yang mengganggu kesehatan manusia dan aktivitas sekolah yang diliburkan, aktivitas transportasi di darat, udara dan laut. Kabut asap ini dirasakan juga oleh Negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Penelitian ini untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana peran pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di

⁶ Bevaola Kusumasari, 2014, Manajemen bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal, Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

⁷ Dila Ramadanti (2016) Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).

provinsi Riau. Hasil penelitian ini adalah peran pemerintah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ridho Sudrajat yang berjudul peran pemerintah dalam mengatasi kebaakaran hutan di Riau.⁸ Provinsi Riau memiliki hutan dengan luas 6.2 juta Ha sedangkan luas Provinsi Riau 8.2 juta Ha, Terjadi semacam pertukaran status hutan lindung menjadi hutan produksi, berdasarkan data Walhi tahun 2007 hutan tersisa tidak sampai 600.000 Ha Hutan alam, banyak perusahaan dan masyarakat yang dengan sengaja membuka lahan dengan membakar hutan, sehingga berdampak kepada terjadinya kebakaran hutan, Sebagian besar kawasan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang merupakan sumber terbesar polusi asap dalam kebakaran-kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kebijakan dan tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh pemerintah, pemilik modal besar, maupun kecil, telah mengakibatkan kerusakan ekologis yang parah. Pembakaran lahan umumnya petani atau perkebunan memakai teknik tebas bakar dalam pembukaan lahan kebun sawit mereka. Dengan teknik ini memungkinkan pengembang untuk membersihkan lahan dengan biaya lebih murah dan lebih cepat. Namun demikian, penyiapan lahan dengan cara membakar memberikan dampak yang sangat merusak. Pertama, kebakaran di lahan gambut sangat sulit dipadamkan mengingat bara apinya berada di bawah permukaan tanah. Bara ini dapat menjalar ke mana-mana dan sulit diperidiksi. Hal ini membuat kebakaran merambat dan meluas sehingga tidak terkendali lagi.

⁸ Ridho Sudrajat (2019) Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan di Riau. Jurnal Ilmu Hukum, 16(1).

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sunanto yang berjudul peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.⁹ Hasil penelitian menunjukkan : (1) sering terjadinya kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya disebabkan masih dilakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar terutama untuk kegiatan pertanian tanaman pangan semusim, (2) kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya adalah kebakaran pada lahan-lahan pertanian yang dibiarkan kosong, (3) pencegahan kebakaran lahan telah diupayakan melalui pembakaran terkendali, penetapan aturan desa dan kesepakatan masyarakat yang terbukti efektif mencegah kebakaran lahan, (4) upaya penanggulangan kebakaran lahan telah dilaksanakan masyarakat secara spontan dan bergotong royong dengan memprioritaskan lahan yang memiliki potensi ekonomi, (5) pelibatan masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui pembentukan Kelompok Peduli Api hingga saat ini belum efektif karena masih bersifat formalitas, (6) masih sering terjadinya kebakaran lahan bukan dikarenakan kurangnya peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan namun lebih karena adanya perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat memandang bahwa kebakaran yang saat ini terjadi adalah kebakaran pada lahan pertanian yang dibiarkan kosong sehingga tidak perlu dipadamkan karena tidak adanya aset ekonomi yang perlu diselamatkan, selain itu lahan pertanian yang dibiarkan kosong juga merupakan sumber bersarangnya hama pertanian yang sangat merugikan masyarakat. Bagi pemerintah semua kebakaran perlu diupayakan untuk

⁹ Sunanto (2006) Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan. Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Universitas Diponegoro.

dipadamkan sehingga kebakaran di lahan pertanian yang dibiarkan kosong pun haruslah menjadi fokus penanganan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka direkomendasikan : mengintegrasikan kebijakan pemerintah dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan masyarakat dengan melakukan revitalisasi pembentukan Kelompok Peduli Api, peningkatan keterampilan masyarakat dan sarana penanggulangan kebakaran lahan, peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian tanpa bakar, pengintegrasian antara pertanian dan peternakan serta penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya pertanian.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto yang berjudul analisis kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.¹⁰ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum tentang hutan dan lahan terjadinya kebakaran, menganalisis kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan memberikan alternatif kebijakan dalam pelaksanaan di lapangan. Hasilnya menunjukkan itu Titik api di Provinsi Jambi dalam 5 (lima tahun) terakhir (2011 - 2015) paling banyak terjadi di Kabupaten Tebo, Muaro Jambi dan Sarolangun, dan ada penutupan hubungan antara peningkatan titik api dengan infeksi saluran pernapasan akut masyarakat di Provinsi Jambi. Peraturan dan implementasi kebijakan di bidang kehutanan dan kebakaran lahan lemah dan perlu perbaikan. Strategi kebakaran hutan dan lahan Kebijakan pencegahan dan pengendalian adalah: Meningkatkan peran hukum dan mengoptimalkan dukungan

¹⁰ Supriyanto (2018) Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Jambi. Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi.

pemerintah pusat dalam mengatasi bencana karhutla. Mengoptimalkan peran kepala daerah dalam melibatkan LSM, masyarakat, dan perguruan tinggi di hutan dan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan; Memperkuat fungsionalitas penataan ruang dalam dokumen Rencana Tata Ruang sebagai upaya mengatasi permasalahan tata ruang. Meningkatkan peran legislatif dalam pengawasan, legislasi dan penganggaran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Menegakkan penegakan hukum dalam tindakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan; Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan memperjelas tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyempurnaan kualitas sumber daya manusia untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk dan masalah.

Perbedaan dari referensi penelitian yang saya gunakan dengan penelitian saya yaitu, penelitian saya bersifat normatif dan empiris objek penelitian di lakukan di wilayah Provinsi Jambi, penelitian sebelumnya menerapkan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan tidak berdasarkan aspek hukum. Kebakaran hutan dan lahan banyak dilakukan oleh para petani dan perusahaan, hal ini dikarenakan efek jera yang diterima pelaku pembakar lahan tidak efektif, beberapa perusahaan terbukti tak mematuhi aturan PP 57 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang mengatur tinggi muka air gambut, tidak memiliki sarana pemadaman, personel kurang, tidak membuat sekat kanal dan lain-lain. Kendati demikian, sejak 2015-2019, Pemerintah Jambi belum pernah memberikan sanksi pada perusahaan dengan konsesi terbakar.

Maka dengan mendorong, pemerintah mengevaluasi semua izin perusahaan dan penegakan hukum pada perusahaan dengan konsesi terbakar. Perusahaan juga

dituntut bertanggung jawab atas dampak karhutla. Termasuk, penerapan Perda No.2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Terkait dengan fenomena tersebut, Peneliti tertarik menganalisis dan menelaah tentang **“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2019 Di Jambi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi Tahun 2019?
2. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengendalian kebakaran dan lahan di Provinsi Jambi Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengendalian kebakaran dan lahan di Provinsi Jambi Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan pada khususnya mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
- 2) Dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi, juga sebagai literature atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti mengenai strategi pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan Provinsi Jambi.
- 2) Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitanya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah kebakaran hutan dan lahan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi tidak dapat dilepaskan sumber daya yang

dimiliki oleh organisasi yang digunakan atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.¹¹

Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.¹² Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau kelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran maka kinerja pada individu atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya.

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan pemerintah bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota. Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.¹³

¹¹ Ismail, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, (Jakarta: Kencana 2013), hlm

¹² Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 95

¹³ Ibnu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Refika Aditama, Jakarta, 2010), hlm. 11.

1. Indikator Kinerja

Terdapat lima indikator dalam mengukur kinerja organisasi khususnya dalam birokrasi publik, di antaranya yaitu:

- 1) Produktivitas, di mana indikator ini mengukur kinerja berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik.
- 2) Kualitas layanan, di mana dengan melihat kualitas pelayan publik dalam menjalankan suatu birokrasi, kepuasan masyarakat dapat menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja. Apabila masyarakat telah merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan maka kualitas layanan tersebut dapat dikatakan baik, namun apabila masyarakat belum puas maka kualitas layanan kurang baik.
- 3) Responsivitas, di mana dengan indikator ini dapat mengukur kinerja dengan melihat kemampuan birokrasi untuk mengetahui dan menangkap kebutuhan publik. Hal ini dilihat dengan menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta penyusunan program maupun kegiatan yang berdasarkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
- 4) Responsibilitas, di mana indikator ini menjelaskan kesesuaian antara pelaksanaan kinerja birokrasi publik dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar terhadap kebijakan birokrasi yang telah ditetapkan.

- 5) Akuntabilitas, di mana indikator ini dapat menunjukkan seberapa tingkat kepatuhan kebijakan dan kinerja birokrasi publik pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.¹⁴

Adanya indikator-indikator di atas maka kinerja organisasi khususnya dalam memberikan pelayanan publik dapat diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu organisasi. pelaksanaan evaluasi kinerja ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan-perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, kinerja suatu organisasi dengan kinerja organisasi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dalam mengevaluasi kinerja BPBD Provinsi Jambi akan lebih menggunakan perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Selain itu juga menggunakan perbandingan kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya.

Ada tiga faktor dalam akuntabilitas menunjukkan seberapa tingkat kepatuhan kebijakan dan kinerja birokrasi publik pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat: lingkungan eksternal organisasi, faktor internal organisasi, dan faktor pegawai. Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008) hlm 56

¹⁵ Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 272.

2. Lingkungan Eksternal Organisasi

Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi akan tetapi sangat mempengaruhi kinerja pegawai.

Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain adalah:

- 1) Faktor ekonomi mikro dan makro. Jika ekonomi makro dan mikro memburuk dan inflasi meninggi yang berakibat barang dan jasa meningkat sedangkan upah pegawai tetap, akan mempengaruhi nilai nominal upah pegawai yang merosot daya belinya. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial setiap tahun berupa unjuk rasa dan pemogokkan kerja.
- 2) Kehidupan politik. Kehidupan politik yang tidak stabil juga mempengaruhi kinerja para pekerja. Di negara-negara yang kacau kehidupan politiknya akan menimbulkan konflik politik yang mengganggu produktivitas tenaga kerja. Akibatnya inflasi melangit dan produktivitas merosot drastis, perusahaan bangkrut, dan buruh kehilangan pekerjaannya.
- 3) Kompetitor. Kompetitor merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas suatu organisasi bisnis. Kompetitor mendorong perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa lebih banyak dan lebih baik serta lebih murah untuk menciptakan keunggulan komperatif, keunggulan diferensial, dan keunggulan kompetitif.

3. Faktor-faktor internal

- 1) Budaya organisasi. Tugas dari pada manajer SDM adalah menginternalisasi, mencuci otak, dan mengajarkan melalui pelatihan isi

budaya organisasi kepada para pegawai sehingga mereka memahami dan menerapkannya, sebagai panduan dalam memproduksi produk dan melayani para konsumen. Manajer SDM juga mengawasi dan menegakkan pelaksanaan budaya organisasi oleh para pegawai.

- 2) Iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan persepsi para anggota organisasi mengenai apa yang terjadi secara rutin dalam lingkungan internal organisasi. Iklim organisasi sangat mempengaruhi sikap dan perilaku para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya yang kemudian mempengaruhi kinerja mereka. Oleh karena itu, tugas manajer adalah menciptakan suatu iklim organisasi yang kondusif yang memungkinkan para pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.

4. Faktor-faktor Pegawai

- 1) Etos Kerja. Etos kerja seorang individu dan suatu bangsa sangat menentukan keberhasilan individu dan bangsa tersebut dalam mencapai tujuannya. Para pegawai yang bertalenta yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya merupakan pegawai yang beretos kerja tinggi.
- 2) Disiplin kerja. Salah satu perilaku pegawai yang mempengaruhi kinerjanya adalah disiplin kerja. Perilaku disiplin pegawai adalah perilaku pegawai yang memenuhi standar perilaku, kode etik, peraturan kerja, prosedur operasi kerja yang ditetapkan oleh organisasi.
- 3) Kepuasan kerja adalah persepsi perasaan dan sikap orang mengenai berbagai aspek dari pekerjaannya. Persepsi tersebut dapat positif yang

menimbulkan kepuasan kerja dan negatif yang menimbulkan ketidakpuasan kerja.

1.5.2 Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, dan rekonstruksi bencana. Secara umum, manajemen bencana bertujuan untuk mencegah dan membatasi jumlah korban serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban, mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Ada lima komponen kesiagaan penanggulangan bencana yaitu:

1. Kesiapan manajemen operasi penanggulangan bencana.
2. Kesiapan fasilitas penanggulangan bencana.
3. Kesiapan komunikasi penanggulangan bencana.
4. Kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana.
5. Dokumentasi.

Suatu Kabupaten/Kota melakukan kesiapsiagaan bencana agar bisa memastikan kondisi masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen bencana secara terpadu.¹⁶

¹⁶ Khambali, Manajemen Penanggulangan Bencana, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), hlm. 50-52

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi:

1. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
2. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban , harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.¹⁷

Selain melakukan pencegahan, pemerintah juga melakukan penanggulangan melalui berbagai kegiatan antara lain memberdayakan poskuposko kebakaran hutan, serta melakukan pembinaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama siaga I dan II. Dengan mobilitas semua sumber daya (manusia, peralatan, dan dana) disemua tingkatan, baik di jajaran Departemen Kehutanan maupun instansi lainnya, maupun perusahaan-perusahaan. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah. Meminta bantuan luar negeri untuk memadamkan kebakaran antara lain: pasukan BOMBA dari Malaysia untuk kebakaran di Riau, Jambi, Sumsel, dan

¹⁷ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Kalbar; Bantuan pesawat AT 130 dari Australia dan pesawat Hercules dari USA untuk kebakaran di Lampung; Bantuan masker, obat-obatan dan sebagainya.¹⁸

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. mengacu dari peraturan diatas maka pemerintah daerah melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Pencegahan
2. Pemadaman
3. Penanganan pasca kebakaran

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Saharjo antara lain:

1. Pencegahan terjadinya kebakaran
2. Pemadaman kebakaran hutan
3. Tindakan pasca kebakaran hutan.

Kebijakan pemerintah adalah pemerintah (*public*) itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.²⁰

1. Kebijakan

Kebijakan *public* adalah suatu kumpulan keputusan yang di ambil oleh seorang pelaku atau sekelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan.²¹ Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang

¹⁸ Soemarsono dalam Popi Tuhulele, Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Perubahan Iklim, Jurnal Supremasi Hukum, (vol. 3, No. 2, Desember 2014), hlm. 131.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

²⁰ Mardalis , *Metode Penelitian suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi aksara, 2010), hlm.41.

²¹ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan & al-quran*, (Jakarta: Bumi aksara,2010), hlm.13

tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah Negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dyedapat didefinisikan sebagai keputusan dimana Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya permasalahan publik.

2. Pemerintah

Istilah berasal dari Perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dilakukan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara atau daerah atau badan tinggi yang memerintah diartikan dengan perbuatan seperti cara, hal urusan dan sebagainya. Memerintah secara etimologi dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus atau kebijakan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.²²

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Menurut pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mengamanatkan bahwa badan penanggulangan bencana daerah yang disingkat dengan BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya

²² Budi Winarto, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: caps,2012), hlm.15.

pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB untuk tingkat nasional, BPBD Provinsi untuk tingkat Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.²³

4. Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

- 1) Pemadam titik-titik api yang dilakukan sedini mungkin oleh tim darat yang dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi Jambi, oleh Brigade Manggala Agni (UPT BKSD/ Kementerian LH dan kehutanan), yang didukung oleh segenap elemen dan kekuatan masyarakat yang ada.
- 2) Penanggulangan bahaya asap akibat bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab Bupati/Walikota dan setempat yang didalam pelaksanaannya dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota. Dalam hal ini BPBD Provisi Jambi akan merapat memberikan Bantuan.
- 3) Apabila dalam kondisi ekstrim akan meminta bantuan pemerintah pusat melalui BNPB Republik Indonesia dalam bentuk teknik modifikasi cuaca (hujan buatan) dan bom air.
- 4) TNI dan POLRI akan selalu dilibatkan dalam mendukung operasi penanganan bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan, untuk mempercepat proses dan membangun partisipasi masyarakat dalam ikut membantu tugas dan fungsi pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

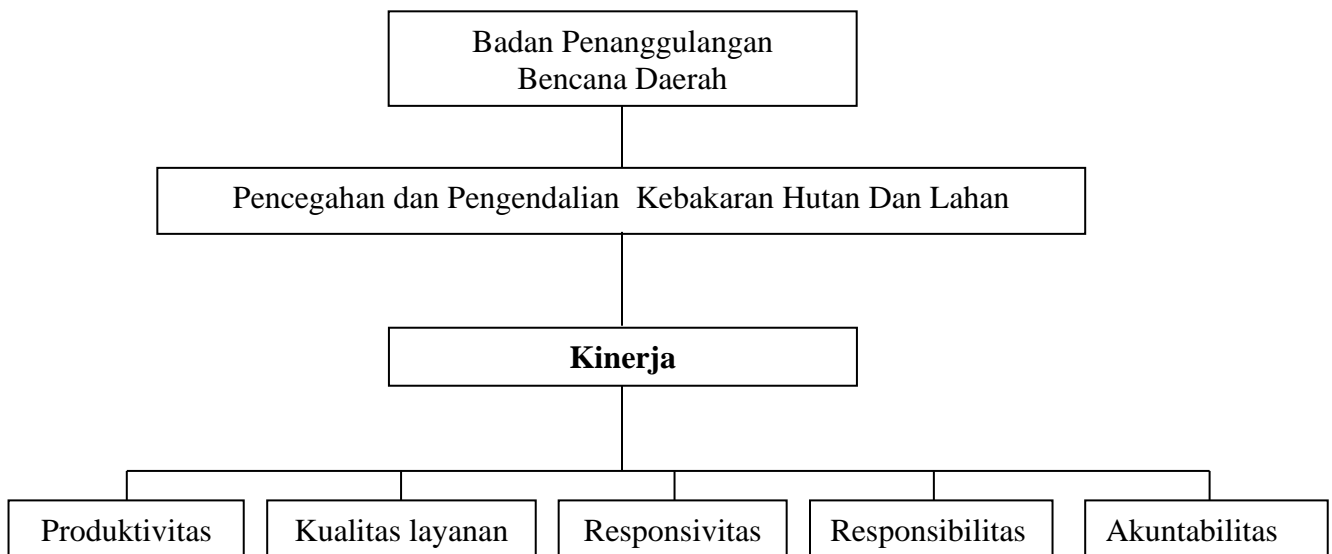
²³ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.6 Kerangka Pikir

Berikut adalah kerangka pikir yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

KERANGKA PIKIR PERAN BPBD PROVINSI JAMBI DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN TAHUN 2019 DI JAMBI

Gambar 1.2 : Kerangka Pikir



BPBD Provinsi Jambi merupakan lembaga terdepan dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus terjadi. Kebakaran hutan yang pernah terjadi pada tahun 2019 menjadi evaluasi bersama khususnya pemerintah di Provinsi Jambi. Peran BPBD dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilihat dari aspek saat sebelum bencana, saat terjadi bencana dan saat pasca bencana. Indikator yang terdapat dalam mengukur kinerja BPBD di Provinsi Jambi dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu diukur dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, resposibilitas dan akuntabilitas.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. “Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian karena ikut menunjang proses penyelesaian permasalahan teliti.²⁴

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. “Menurut Locke, Spirduso, dan Silverman penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif, yang didalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan, keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian masalah strategis, etis, dan personal dalam proses penelitian kualitatif.²⁵

1.7.2 Lokasi Penelitian

lokasi objek penelitian terdapat di Provinsi Jambi. Adapun pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini yakni untuk meninjau implementasi peran pemerintah daerah dalam pengendalian kebakaran hutan di Provinsi Jambi.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ALfabeta. 2015, hlm. 2

²⁵ John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran) Edisi 4*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.251

tentang apa yang kita harapkan, atau dia mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti. “Selain itu peneliti juga menggunakan *snowball sampling* yang merupakan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.”²⁶ Berikut beberapa informan dalam penelitian ini adalah BPBD Provinsi Jambi yang terdiri :

1. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.
2. Kepala Seksi Pencegahan
3. Kepala Seksi Kedaruratan

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa Teknik untuk mengumpulkan data. “Adapun Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah”²⁷:

1. Observasi

Teknik Pengumpulan data dengan observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *face to face* (wawancara berhadap-hadapan). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RD* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 225

²⁷ *Ibid*, hlm.254

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses *mereview* kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditentukan. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat misalnya, buku harian, diari, surat, email). Dokumentasi ini diambil dapat berbentuk dokumen publik dan dokumen pribadi guna memperoleh data-data, foto serta catatan lapangan yang ada di lokasi penelitian.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dilapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana strategi pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan Provinsi Jambi. “Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis Miles dan Huberman, yaitu terdiri atas Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.”²⁸

1. Reduksi Data

Ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relative beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu ditulis dalam bentuk laporan atau data yang diperoleh direduksi, dirangku, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil yang mengikhtiarkan dan memilah-milh berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan

²⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 218-220

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan yang mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan²⁹.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles and Huberman menyatakan “*then most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif dengan teks naratif. Adapun fungsi penyajian data disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁰

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

konsisten saat peneliditi kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³¹

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

1.7.6 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi data yaitu triangulasi yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sumber informasi yang berbeda untuk menguji kebenaran data mengenai fenomena atau gejala sosial tertentu yang sedang diteliti³².

Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi data yaitu sebagai berikut.³³ :

1. Trigulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas dengan tata cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.
3. Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering dipengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pagi, siang dan malam hari akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredible.

³¹ *Ibid*

³² Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017, Hlm. 26

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ALfabeta. 2015, hlm. 2